



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURDIANSYAH**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU**
3. NHK : **1028919**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.567.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 986 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 616 m2/224 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 1.902 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 1.480 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 71.000.000
7. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 170.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.767.000.000
III. HUTANG	Rp.	104.308.080
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.662.691.920

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.